

## **ANALISIS DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BULELENG**

I Made Gunamantha<sup>1</sup>, Gede Putu Agus Jana Susila<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja-Bali

Email: md\_gunamantha@yahoo.com

### **Abstrak**

Pendekatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPD merupakan pengembangan lebih lanjut dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1998. Salah satu agenda penting di tingkat masyarakat terkait pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan adalah kegiatan pengembangan kapasitas individu masyarakat, pada tataran pelaksanaan di masyarakat kegiatan pengembangan kapasitas tersebut meliputi proses sosialisasi, pelatihan dan pelaksanaan siklus pemberdayaan. Alat analisis yang digunakan dalam mengevaluasi proses pemberdayaan adalah menggunakan model pendekatan evaluasi Fujikake. Model Fujikake merupakan salah satu model evaluasi yang menurut penulis cukup implementatif, dimana indikator-indikator yang digunakan cukup lengkap dan bisa diukur dengan jelas. Penjabaran mengenai model analisis ini telah dijelaskan secara detail dalam kajian literatur. Hasil dari analisis model Fujikake ini selanjutnya digunakan sebagai masukan atau akan dibahas lebih dalam pada metode analisis berikutnya yaitu analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka didapatkan temuan bahwa rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan dalam program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Sawan dan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng telah menunjukkan perkembangan kapasitas masyarakat yang cukup baik, hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pemberdayaan menekankan pentingnya suatu proses edukatif atau pembelajaran dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka, sehingga masyarakat memiliki gagasan-gagasan, pemahaman, kosakata, dan keterampilan bekerja menuju perubahan yang efektif dan berkelanjutan (Ife dan Tesoriero, 2008: 148 dan 350).

**Kata kunci:** PNPM Mandiri Pedesaan, Model Fujikake, Pengembangan Kapasitas

### Abstract

PNPM-MPD approach is a further development of the Kecamatan Development Program (KDP) which has been implemented since 1998. One of the important agenda at the community level related to the implementation of PNPM-MPD is individu community capacity building activities, at the level of implementation in community capacity building activities such includes the process of socialization, training and implementation of empowerment cycle. The analysis tool used to evaluate the process of empowerment is to use a model evaluation approaches Fujikake. Fujikake Model is one model evaluation according to the author quite implementable, where indicators are used quite complete and can be clearly measured. Elaboration of this analysis model has been described in detail in the literature review. The results of this model analysis Fujikake then used as input or will be discussed in the subsequent analysis method is descriptive qualitative analysis. From the results of research and analysis that has been done then obtained findings that a series of capacity building activities carried out in the community empowerment program PNPM-MPD in the subdistrict Kubutambahan and subdistrict Sawan district Buleleng has shown the development of community capacity is quite good, it is consistent with the theory that empowerment emphasize the importance of an educational or learning process in equipping people to improve their empowerment, so that people have ideas, comprehension, vocabulary, and skills to work towards effective and sustainable change (Ife and Tesoriero, 2008: 148 and 350).

**Keywords:** PNPM Rural, Fujikake Model, Capacity

### PENDAHULUAN

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) misalnya, Pemerintah telah menetapkan Penanggulangan Kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan untuk periode tahun 2009-2014. Dokumen ini mengacu kepada Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) dengan target sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau MDGs). Keterkaitan berbagai agenda pembangunan tersebut diharapkan dapat lebih memfokuskan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga

percepatan pencapaian target pengurangan kemiskinan dapat diwujudkan. Pemerintah daerah di era otonomi daerah memiliki tanggung jawab dan keleluasan yang cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan strategis bagi upaya-upaya mengatasi kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakatnya. Kemiskinan itu sendiri merupakan masalah besar dan kompleks yang ditimbulkan oleh kondisi dan interaksi budaya, sosial, politik dan ekonomi. Karenanya strategi dan program penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara

bertahap, terencana, dan berkesinambungan, serta menuntut keterlibatan semua pihak.

Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumberdaya yang tersedia. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara bertahap, terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak, dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin sehingga mencapai kehidupan yang layak. Kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, merupakan agenda pokok pembangunan sesuai RPJMD 2007-2012. Bahkan untuk RPJMD 2012-2017, penanggulangan kemiskinan masih menjadi agenda prioritas dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Buleleng. Berbagai kebijakan dan program sebelumnya telah diimplementasikan. Namun upaya itu belumlah cukup untuk mengurangi secara signifikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng. Belum optimalnya pencapaian program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan selama lima tahun terakhir disegala bidang umumnya disebabkan sangat rentannya kondisi masyarakat miskin terhadap perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan bencana alam yang terjadi.

Merujuk pada angka-angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng; pada tahun 2007 terdapat 53.400 orang penduduk miskin yang terdapat pada

47.908 rumah tangga miskin (RTM), dengan prosentase penduduk miskin adalah sebesar 8,30 % dari jumlah penduduk miskin Tahun 2007 sejumlah 643.274 jiwa. Sedangkan pada Tahun 2011 terdapat 37.950 penduduk miskin yang terdapat pada 8.422 Rumah Tangga (RT), dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,62 % dari jumlah penduduk tahun 2011 sebesar 675.513 tahun 2011. Kondisi obyektif diatas menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensi yang memerlukan penanganan secara menyeluruh dan secara bersama serta mengedepankan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar manusia. Kemiskinan terjadi bukan semata-mata karena kurangnya pendapatan, tetapi karena tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan memenuhi kehidupan yang bermartabat sebagai bagian dari hak manusia yang paling asasi. Terdapat begitu beragamnya dimensi yang menyangkut masalah kemiskinan yang dibarengi dengan beragamnya potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin yang menumbuhkan adanya kerumitan, dimana setiap faktor saling terkait dan mempengaruhi sehingga untuk menyelesaikannya perlu dilaksanakan sebuah program yang komprehensif dan berkelanjutan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) merupakan program pembangunan yang dikelola Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan PNPM-MPD merupakan pengembangan lebih lanjut

dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1998. Dalam kurun waktu perjalanan PNPM-MPD ini, terjadi dinamika dan perkembangan yang pesat, khususnya terkait penambahan lokasi dan alokasi program. Saat ini sebagian besar lokasi kecamatan di Indonesia ditetapkan sebagai lokasi PNPM-MPD. Pelaksanaan PNPM-MPD telah mendorong terciptanya perangkat sistem sosial yang bersifat dinamis. Sistem sosial yang dibangun oleh PNPM-MPD memungkinkan warga desa memperoleh peningkatan kapasitas tidak hanya dalam bentuk kursus dan pelatihan, tetapi juga pembiasaan cara berpikir dan cara bertindak bagi warga desa ketika mereka menjalankan peranannya masing-masing di dalam pelaksanaan program. Masyarakat dibiasakan memperoleh pengalaman nyata menjalankan sebuah proses pembangunan desa yang bersifat partisipatif. Khususnya pembelajaran masyarakat melalui kegiatan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) telah menghasilkan peningkatan kemampuan masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah secara partisipatif. Pengalaman masyarakat dalam perencanaan pembangunan ini perlu dihargai dengan mendayagunakan secara nyata rencana pembangunan jangka menengah desa hasil MMDD dalam menetapkan usulan rencana kegiatan PNPM-MPD maupun rencana kegiatan pembangunan di desa yang diusulkan untuk dibiayai dengan dana swadaya, dana APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.

Salah satu agenda penting di tingkat masyarakat terkait pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan adalah kegiatan pengembangan kapasitas individu masyarakat, pada tataran pelaksanaan di masyarakat kegiatan pengembangan kapasitas tersebut meliputi proses sosialisasi, pelatihan dan pelaksanaan siklus pemberdayaan. Dalam implementasinya ketiga kegiatan tersebut harus berjalan terus dan berkesinambungan karena yang diharapkan dari pemberdayaan adalah pembiasaan masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif dan peran serta masyarakat dapat menjadi budaya dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam kondisi yang ideal proses pengembangan kapasitas masyarakat harus dijalankan dengan menyesuaikan kemampuan dan karakteristik masyarakat setempat, sehingga bisa jadi proses tersebut memerlukan waktu dan pendekatan yang berbeda-beda antar satu komunitas dengan komunitas lainnya. Untuk memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat dalam partisipasi demi kemajuan mereka sendiri juga tidak bisa disamaratakan antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain, hal ini disebabkan karena latar belakang pemikiran yang beragam yang dipengaruhi oleh status sosial, jenis kelamin, usia, pekerjaan dan tingkat pendidikan. Oleh karena itu derajat keberdayaan masyarakat akan sangat bervariasi meskipun proses pengembangan kapasitas yang ada dilakukan dengan pendekatan yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.

## METODE

Analisis berarti kategorisasi, penataan, manipulasi dan peringkasan data untuk memperoleh jawab bagi pertanyaan penelitian (Kerlinger, 2006: 217), oleh karena itu metode analisis bisa disebut sebagai cara yang digunakan untuk mengolah dan menguji data terhadap pertanyaan penelitian dengan menggunakan prosedur tertentu. Dalam penelitian ini terdapat dua metode analisis yang digunakan, yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mendapatkan deskripsi tentang sikap dan cara pandang masyarakat yang didapatkan dari pengolahan data hasil kuesioner.

Dalam analisis deskriptif kuantitatif ini, langkah awal setelah didapatkan data adalah pengolahan komponen data yang terdiri dari pengkategorian data awal, pengolahan data menggunakan teknik distribusi frekuensi melalui perhitungan statistika sederhana, mengukur sebaran data menggunakan perhitungan varian dan standar deviasi serta teknik pengontrolan data menggunakan teknik perhitungan *cross-tabulation*. Hasil perhitungan kuantitatif selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang selanjutnya menjadi bahan masukan bagi analisis selanjutnya yaitu analisis secara kualitatif.

Alat analisis yang digunakan dalam mengevaluasi proses pemberdayaan adalah menggunakan model pendekatan evaluasi Fujikake. Model Fujikake merupakan salah satu model evaluasi yang menurut penulis cukup implementatif, dimana indikator-

indikator yang digunakan cukup lengkap dan bisa diukur dengan jelas. Penjabaran mengenai model analisis ini telah dijelaskan secara detail dalam kajian literatur. Hasil dari analisis model Fujikake ini selanjutnya digunakan sebagai masukan atau akan dibahas lebih dalam pada metode analisis berikutnya yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Metode analisis kedua yang dipakai adalah metode analisis deskriptif kualitatif, dimana analisis ini digunakan untuk menggambarkan implementasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas dan menganalisis penilaian masyarakat mengenai proses pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga dapat diketahui kemajuan atau pencapaian tahapan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Buleleng telah sampai pada tahapan yang mana, sesuai teori tahapan pemberdayaan oleh Wilson (1996).

Dalam analisis kualitatif, langkah-langkah analisis yang sering digunakan untuk memahami komponen-komponen data adalah melalui (a) reduksi data, (b) penyajian data dan (c) menarik kesimpulan/verifikasi (Milles and Huberman, 2009: 591-592). Reduksi data dimaksudkan untuk menata data agar menjadi lebih ringkas, terstruktur dan sesuai dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

Teknik reduksi data ini meliputi tahapan perangkuman data (*data summary*), pengkodean (*coding*), merumuskan tema-tema, pengelompokan (*clustering*) dan penyajian cerita secara tertulis. Penyajian data merupakan bagian kedua dari tahap analisis, yang terdiri

dari langkah-langkah penyusunan ringkasan terstruktur dan sinopsis, deskripsi singkat, diagram-diagram, atau matriks dengan teks. Tahap ketiga berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji.

Tahap akhir dari analisis adalah penarikan kesimpulan dan rumusan rekomendasi. Kesimpulan yang diharapkan muncul dari penelitian ini adalah jawaban atas pertanyaan penelitian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sejauh mana proses pengembangan kapasitas masyarakat di Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan dan proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Buleleng telah mencapai tahapan yang mana, apakah pada tahapan kesadaran, pemahaman, pemanfaatan, atau telah sampai pada tahapan pembiasaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sintesis antara Temuan Penelitian dengan Teori**

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka didapatkan temuan bahwa rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan dalam program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Sawan dan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng telah menunjukkan perkembangan kapasitas masyarakat yang cukup baik, hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pemberdayaan menekankan pentingnya suatu proses edukatif atau pembelajaran dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka, sehingga

masyarakat memiliki gagasan-gagasan, pemahaman, kosakata, dan keterampilan bekerja menuju perubahan yang efektif dan berkelanjutan (Ife dan Tesoriero, 2008: 148 dan 350). Namun proses pembelajaran yang dilakukan selama ini masih terbatas pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan semata dan belum sampai pada tahap merubah kebiasaan masyarakat, sedangkan untuk menjamin keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat maka siklus-siklus pemberdayaan yang telah diajarkan seyogyanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial kemasyarakatan masyarakat itu sendiri, sebagaimana yang teori yang menyatakan bahwa Perubahan budaya sangat diperlukan untuk mampu mendukung upaya sikap dan praktik bagi pemberdayaan yang lebih efektif (Sumaryadi, 2005: 105).

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Sawan dan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng meliputi aspek pengutamaan kepentingan umum, kesamaan nilai dalam masyarakat, melayani masyarakat, komunikasi antar warga, peningkatan kepercayaan diri masyarakat, pengembangan manajemen keorganisasian, kepemimpinan kolektif, aspek politis, jaringan kerja, peningkatan keterampilan dan keahlian, dan nilai-nilai kebersamaan dalam bermasyarakat. Nilai-nilai di atas sesuai dengan teori mengenai 16 elemen-elemen pengembangan kapasitas yang disampaikan oleh Bartle (2007).

Pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan seharusnya melibatkan secara penuh peran masyarakat miskin sebagai pelaku dan penerima manfaat program, namun selama ini pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang salah satunya di Kecamatan Sawan dan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng lebih banyak dijalankan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang sebagian besar tidak termasuk dalam golongan miskin. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sumaryadi (2005: 154-158) bahwa ketergantungan adalah budaya, dimana masyarakat miskin yang selama ini tidak banyak dilibatkan dalam pembangunan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan masyarakat lain yang non miskin termasuk dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut dirinya. Ketergantungan itu telah menjadi kebiasaan dan lama kelamaan menjadi budaya sehingga untuk mengubahnya juga harus dengan upaya yang terpadu, sistematis dan tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, dengan senantiasa memperhatikan karakteristik mereka sebagai masyarakat miskin dalam pendekatannya.

Dari hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa perubahan sikap dan cara pandang masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara umum tidak dipengaruhi oleh perannya dalam program tersebut, usia, dan tingkat pendidikannya, sedangkan faktor yang lebih banyak berpengaruh adalah jenis kelamin. Artinya pendekatan yang selama ini dijalankan dalam program

PNPM Mandiri Pedesaan sesuai untuk semua lapisan masyarakat baik tua atau muda, baik berpendidikan rendah atau tinggi, namun masih perlu peningkatan pada program-program yang mendukung kesetaraan gender. Pengembangan kapasitas masyarakat sebagai salah satu prinsip dalam pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dalam PNPM Mandiri Pedesaan menyesuaikan dengan elemen-elemen pemberdayaan yang dilaksanakan yaitu pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dari hasil temuan penelitian didapatkan bahwa pengembangan kapasitas secara tidak langsung juga mendorong pemberdayaan politik, dimana masyarakat memiliki kapasitas dan kewenangan dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan kepentingan komunitasnya. Hal ini sesuai dengan teori mengenai lingkup pemberdayaan yang dikemukakan oleh Ndraha (dalam Sumaryadi, 2005) dan yang menyatakan bahwa pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan simultan melalui program pemberdayaan politik, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan.

Pemberdayaan politik yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat terhadap pemerintah dan pihak lainnya sehingga hak-hak masyarakat dapat diterima tanpa merugikan orang lain. Dari hasil temuan penelitian mengenai evaluasi pemberdayaan dengan menggunakan 12 Indikator pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dikemukakan Fujikake (2008) didapatkan bahwa indikator tersebut cukup representatif

untuk mengevaluasi proses pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Sawan dan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Namun ada satu aspek yang dapat ditambahkan yaitu aspek pemberdayaan perempuan. Karena dari temuan didapatkan bahwa selama ini peran perempuan masih kurang dalam pembangunan di tingkat komunitas.

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif serta pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakikat program pemberdayaan adalah pembelajaran bagi masyarakat, sehingga bisa dikatakan bahwa elemen utama dari pemberdayaan adalah pengembangan kapasitas masyarakat itu sendiri. Rangkaian pengembangan kapasitas dalam PNPM Mandiri Pedesaan yang terdiri dari kegiatan sosialisasi, pelaksanaan siklus, dan pelatihan di Kecamatan Sawan dan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng telah dijalankan dengan baik, dengan menggunakan pendekatan sosio-kultural yaitu dengan memperhatikan aspek keagamaan, aspek gender dan kebiasaan sehari-hari masyarakat.
2. Sikap dan cara pandang masyarakat Kecamatan Sawan dan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tergolong baik atau tinggi. Sikap dan cara pandang masyarakat tersebut

secara umum tidak dipengaruhi oleh golongan usia, tingkat pendidikan dan perannya dalam PNPM namun lebih banyak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Kualitas keterlibatan, peran dan tanggapan kaum perempuan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki, meskipun secara kuantitas tingkat partisipasinya bisa dikatakan telah mencukupi.

3. Evaluasi pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan melalui kajian evaluatif terhadap proses maupun hasilnya. Temuan evaluatif terhadap proses pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sawan dan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan telah sesuai dengan tahapan pemberdayaan yang ditentukan dalam PNPM Mandiri Pedesaan maupun dengan literaturliteratur mengenai pemberdayaan masyarakat. Sedangkan temuan evaluatif terhadap hasil menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang telah berjalan telah berhasil mengubah tingkat kesadaran masyarakat dan meningkatkan pemahamannya untuk turut serta berperan dalam pembangunan di komunitasnya, namun untuk mencapai tingkat kemandirian dan derajat keberdayaan yang sesungguhnya masih diperlukan pembelajaran lebih lanjut yang harus dilakukan secara kontinyu dan terpadu.
4. Pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan lingkungan, sosial dan ekonomi secara tidak langsung



juga mendorong terlaksananya pemberdayaan politik, dimana melalui rangkaian pengembangan kapasitas, masyarakat bisa belajar banyak mengenai kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen komunitas sehingga menjadikan mereka memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam pembangunan dan memiliki posisi tawar yang lebih besar dalam hubungannya dengan pihak lain di luar komunitasnya.

Berdasarkan kajian literatur dan hasil temuan penelitian serta kesimpulan yang didapatkan, maka kami menyampaikan beberapa rekomendasi yang terdiri dari rekomendasi studi dan rekomendasi praktis.

#### 1. Saran Studi

- a. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang berkelanjutan sehingga evaluasi pemberdayaan masyarakat sebaiknya dilakukan secara bertahap dimulai dari sebelum program dilaksanakan, awal pelaksanaan program, dan evaluasi periodik setelah pelaksanaan program, untuk itu diperlukan studi lebih lanjut mengenai evaluasi pemberdayaan pada tiap-tiap tahapan dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut.
- b. Pemberdayaan masyarakat pada tiap-tiap komunitas adalah bersifat unik atau berbeda antar satu komunitas dengan yang lainnya, untuk itu indikator pemberdayaan masyarakat yang digunakan juga harus

menyesuaikan dengan karakteristik komunitas itu dan karakteristik program yang dijalankan. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai indikator pemberdayaan masyarakat khusus untuk kasus-kasus tertentu dan indikator-indikator umum untuk semua program pemberdayaan.

- c. Lingkup kajian mengenai evaluasi pemberdayaan masyarakat dan proses pengembangan kapasitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dalam sebuah komunitas, sedangkan program pemberdayaan yang dilaksanakan adalah sebuah program dalam skala nasional, untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemberdayaan pada masing-masing tingkatan, baik di tingkat regional, wilayah, maupun nasional.

#### 2. Saran Praktis

- a. Masyarakat selaku pelaksana program pemberdayaan belum sepenuhnya mempunyai keberdayaan dan tingkat kemandirian yang cukup untuk mengelola pembangunan dalam komunitasnya, untuk itu peran dan keberadaan fasilitator pendamping masih diperlukan dan harus tetap dipertahankan sampai masyarakat benar-benar terbiasa dengan proses-proses pemberdayaan yang dijalankan serta telah menjadi budaya bagi masyarakat tersebut.

- b. Perlu adanya penambahan kegiatan-kegiatan dan porsi pembelajaran yang lebih banyak bagi kaum perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan peran dan keterlibatannya dalam pembangunan pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya.
- c. Pemerintah dan tim fasilitator perlu memfasilitasi terbentuknya *channeling* dan jaringan kerja yang lebih luas antar semua *stakeholder* pembangunan untuk menjamin keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat khususnya di tingkat komunitas.
- d. Untuk mendukung dan mempercepat pencapaian derajat keberdayaan masyarakat menuju masyarakat madani pendekatan lain yang bisa dilakukan adalah melalui jaringan informasi atau publikasi serta penyebaran *best practice* mengenai pemberdayaan masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat benar benar merasa dekat dan familiar serta merasa menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat tersebut.
- e. Perlu dirintis jalinan kerjasama secara langsung antara komunitas dengan unsur perguruan tinggi, dimana melalui kerjasama tersebut perguruan tinggi dapat menjalankan misinya untuk pengabdian masyarakat dan masyarakat bisa mendapatkan keuntungannya dengan adanya bantuan pemikiran mengenai komunitasnya.
- f. Perlu dirintis pula jaringan kerjasama secara langsung antara komunitas dengan pihak swasta atau dunia usaha, dimana melalui kerjasama tersebut masyarakat dapat memperoleh manfaatnya dari bantuan baik berupa material maupun finansial, dan pihak swasta bisa menjalankan misinya kepada masyarakat sebagai satu bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bartle, Phil, 2007, Elements of Community Strength, <http://www.scn.org/mpfc/modules/mea-elin.htm#Measuring>, diunduh pada 4 Nopember 2009.
- Fujikake, Yoko, 2008, Qualitative Evaluation: Evaluating People's Empowerment,
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank, 2008, Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Kerlinger, Fred N, 2006, Asas-asas penelitian behavioral, Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, 1992, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan

Pemberdayaan Masyarakat,  
Jakarta: Penerbit Citra Utama

Wilson, Terry, 1996, *The Empowerment  
Manual*, London: Grower  
Publishing Company.